



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 12 TAHUN 2012

T E N T A N G KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan wilayah, maka perlu dukungan penyediaan pupuk yang bisa diakses oleh petani/kelompok tani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian;
 - b. berpedoman pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, maka perlu dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 5. Undang – Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 / Pert / HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Pementan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2011
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik; un Anggran 2010
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
12. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 394 Tahun 2008 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Batang Hari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDSI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organik yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk anorganik.....

2. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman, atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengecer resmi di lini IV. Dengan jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna Pink, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organic Granul.
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang di beli oleh petani/Kelompok Tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
9. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
14. Produsen adalah produsen pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT.Pupuk Kujang, PT.Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-Organik yaitu Pupuk Urea, SP-36,ZA,NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
15. PT.Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah Induk PT.Pupuk Sriwijaya Palembang, PT.Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
16. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M.DAG/PER/2/2009
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

20. Komisi Pengawas.....

20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Gubernur untuk Tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB. II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1). Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas 1 (satu) hektar.
- (2). Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan atau Perusahaan Perikanan budidaya.

BAB. III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1). Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pupuk berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2012.
- (2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati Batang Hari.
- (3). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (4). Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, pekebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1). Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2). Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Batang Hari.
- (3). Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sambil menunggu penetapan oleh Bupati Batang Hari guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4). Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV.....

BAB. IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.

Pasal 6

- (1). Pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2). Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya:
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi dimasing-masing wilayah kecamatan.
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3). Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4). Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani /kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5). Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi pengawasan pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang /terhapus yang bertuliskan

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”**Barang dalam Pengawasan**

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2). Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1). Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) *Harga Eceran Tertinggi*.....

- (2). Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|----------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1.800,- per Kg |
| b. Pupuk ZA | = Rp. 1.400,- per Kg |
| c. Pupuk SP-36 | = Rp. 2.000,- per Kg |
| d. Pupuk NPK | = Rp. 2.300,- per Kg |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500,- per Kg |
- (3). Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan, dan/atau udang di **Penyalur Lini IV secara tunai** dalam kemasan sebagai berikut :
- | | |
|------------------|--------------------|
| a. Pupuk Urea | = 50 kg |
| b. Pupuk SP-36 | = 50 kg |
| c. Pupuk ZA | = 50 kg |
| d. Pupuk NPK | = 50 kg atau 20 kg |
| e. Pupuk Organik | = 40 kg atau 20 kg |

BAB. V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1). Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Batang Hari wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2). Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1). Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Batang Hari wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Batang Hari.
- (2). Bupati Batang Hari menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jambi.

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari, dan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 6 Maret 2012



Di undangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 6 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



YAZIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2012 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 12 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 Maret 2012

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
 SEKTOR PERTANIAN MENURUT KECAMATAN**

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Urea	SP - 36	ZA	NPK	Organik
1.	Maro Sebc Ulu	460.56	163.12	69.47	305.70	114.60
2.	Mersam	473.55	168.30	68.70	324.80	114.60
3.	Muara Tembesi	276.50	126.90	53.10	210.40	79.80
4.	Batin XXIV	203.78	87.98	48.62	147.48	68.36
5.	Maro Sebo Ilir	377.70	122.30	54.70	234.80	104.60
6.	Muara Bulian	440.97	154.02	82.38	300.52	101.64
7.	Bajubang	265.45	87.30	44.70	164.80	63.60
8.	Pemayung	243.45	94.90	48.10	229.40	66.80
	Jumlah	2.741.96	1.004.82	469.77	1.917.90	714.00



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 12 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 Maret 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012 MENURUT SUB SEKTOR

(Dalam Ton)

No	Sub Sektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tanaman Pangan	1.012.96	313.00	133.00	881.00	266.00
2.	Hortikultura	201.00	46.00	74.00	96.00	72.00
3.	Perkebunan Rakyat	1.478.00	645.82	262.77	940.90	376.00
4.	Peternakan	0	0	0	0	0
5.	Perikanan	50.00	0	0	0	0
	Jumlah	2.741.96	1.004.82	469.77	1.917.90	714.00



LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 12 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 Maret 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN

No	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	(Dalam Ton)	
						Organik	Organik
1.	Maro Sebo Ulu	177.96	55.00	25.00	160.00		36.00
2.	Mersam	188.00	66.00	25.00	175.00		36.00
3.	Muara Tembesi	119.00	50.00	12.00	96.00		36.00
4.	Bathin XXIV	48.00	12.00	9.00	35.00		29.00
5.	Maro Sebo Ilir	94.00	15.00	11.00	75.00		26.00
6.	Muara.Bulian	200.00	65.00	25.00	160.00		40.00
7.	Bajubang	76.00	15.00	11.00	60.00		27.00
8.	Pemayung	110.00	35.00	15.00	120.00		36.00
	Jumlah	1.012.96	313.00	133.00	881.00		266.00



**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Maro Sebo Ulu	177.96	0.00	45.00	20.10	6.00	20.00	15.00	25.00	7.00	8.24	12.00	11.00	8.62
2.	Mersam	188.00	0.00	45.00	20.00	6.00	20.10	15.00	21.10	13.00	10.00	10.00	19.03	8.77
3.	Muara Tembesi	119.00	0.00	40.00	10.00	3.00	10.00	5.00	12.00	0.32	5.00	5.00	17.00	11.68
4.	Batin XXIV	48.00	0.00	15.00	10.00	2.00	5.00	5.00	0.00	3.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5.	Maro Sebo Ilir	94.00	0.00	25.00	7.00	2.00	9.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.08	8.00	2.92
6.	Muara Bulian	200.00	0.00	55.40	25.00	5.55	18.00	22.95	20.00	20.00	10.00	9.00	10.00	4.10
7.	Bajubang	76.00	0.00	22.00	10.00	2.00	5.00	0.00	5.00	7.00	0.00	12.00	9.00	4.00
8.	Pemayung	110.00	0.00	25.00	15.00	2.00	10.00	10.00	5.00	10.00	0.00	15.00	15.00	3.00
	Jumlah	1.012.96	0.00	272.40	117.10	28.55	97.10	82.95	93.10	65.32	43.24	77.08	93.03	43.09

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Maro Sebo Ulu	55.00	4.00	4.00	4.00	5.00	9.00	9.00	9.00	4.00	2.00	3.00	1.00	1.00
2.	Mersam	66.00	4.00	4.00	4.00	5.00	9.00	9.00	10.00	5.00	3.00	3.00	4.00	6.00
3.	Muara Tembesi	50.00	0.00	2.00	3.00	2.00	5.00	3.00	3.00	5.00	7.00	3.00	6.00	11.00
4.	Batin XXIV	12.00	0.00	2.00	3.00	3.50	2.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
5.	Maro Sebo Ilir	15.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
6.	Muara Bulian	65.00	0.00	3.00	5.00	5.50	8.00	6.00	3.00	10.00	5.00	7.00	6.00	6.50
7.	Bajubang	15.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.50	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.50
8.	Pemayung	35.00	0.00	3.00	5.00	3.00	2.00	4.00	2.00	6.00	3.00	5.00	2.00	0.00
Jumlah		313.00	8.00	22.00	29.00	28.00	38.00	35.00	31.00	31.00	21.00	24.00	21.00	25.00

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)												
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1.	Maro Sebo Ulu	25.00	1.00	2.00	1.50	2.50	2.50	3.50	3.50	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.50
2.	Mersam	25.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.50	3.50	3.50	2.50	2.50	1.50	1.50	1.50	0.00
3.	Muara Tembesi	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
4.	Batin XXIV	9.00	1.00	1.00	0.50	1.00	0.50	1.50	1.50	1.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
5.	Maro Sebo Ilir	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
6.	Muara Bulian	25.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.50	3.00	3.50	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00
7.	Bajubang	11.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.50	2.00	1.50	0.50	0.50	0.50	0.00	1.00
8.	Pemayung	15.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	2.00	2.00	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	2.50
Jumlah		133.00	8.00	10.00	9.00	10.00	11.00	19.00	18.00	16.00	9.00	8.00	7.00	8.00	8.00

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Maro Sebo Ulu	160.00	5.50	11.00	15.00	16.00	20.00	22.00	10.50	8.00	15.00	15.50	16.50	5.00
2.	Mersam	175.00	2.00	15.00	16.00	17.00	18.00	22.50	9.50	11.00	16.50	16.00	15.50	16.00
3.	Muara Tembesi	96.00	5.00	10.00	7.50	15.00	10.00	10.00	11.50	7.00	6.00	3.00	3.00	8.00
4.	Batin XXIV	35.00	4.00	6.00	5.50	5.00	2.00	2.00	3.50	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
5.	Maro Sebo Ilir	75.00	4.50	8.00	8.50	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00	5.00	7.00	17.00
6.	Muara Bulian	160.00	5.00	13.00	15.50	16.00	18.00	19.00	10.00	9.00	10.50	13.50	16.00	14.50
7.	Bajubang	60.00	6.50	6.00	4.50	4.00	6.00	4.50	5.50	4.00	3.00	3.00	3.00	10.00
8.	Pemayung	120.00	6.50	10.00	14.50	12.00	12.00	9.00	9.50	6.00	9.00	5.00	3.00	23.50
	Jumlah	881.00	39.00	79.00	87.00	90.00	90.00	93.00	64.00	50.00	67.00	62.00	65.00	95.00

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Maro Sebo Ulu	36.00	2.50	2.50	3.00	2.50	3.00	2.50	6.50	3.50	3.00	1.50	2.00	
2.	Mersam	36.00	2.50	2.50	3.00	3.00	2.50	6.50	3.00	3.50	1.50	2.50		
3.	Muara Tembesi	36.00	2.50	2.50	2.00	3.00	2.50	6.50	3.00	3.50	2.00	3.00		
4.	Batin XXIV	29.00	2.00	2.00	1.50	2.00	2.00	5.50	2.00	3.50	1.00	2.50		
5.	Maro Sebo Ilir	26.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	5.50	2.00	2.50	2.00	2.00		
6.	Muara Bulian	40.00	3.50	3.50	3.00	3.50	3.50	6.50	4.00	4.50	2.00	2.00	1.00	
7.	Bajubang	27.00	2.00	2.00	1.50	2.00	2.00	5.50	2.00	3.50	1.00	2.00		
8.	Pemayung	36.00	2.00	2.00	2.00	3.50	2.00	6.50	3.50	4.50	2.00	3.00		
Jumlah		266.00	19.00	19.00	17.00	18.00	22.00	19.00	49.00	23.00	20.00	13.00	18.00	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 12 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 Maret 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
 SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN

No	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	(Dalam Ton)	
						Organik	Organik
1.	Maro Sebo Ulu	10.05	2.30	3.70	4.80	4.80	3.60
2.	Mersam	0.05	2.30	3.70	4.80	4.80	3.60
3.	Muara Tembesi	30.15	6.90	11.10	14.40	14.40	10.80
4.	Bathin XXIV	26.13	5.98	9.62	12.48	12.48	9.36
5.	Maro Sebo Ilir	10.05	2.30	3.70	4.80	4.80	3.60
6.	Muara Bulian	74.37	17.02	27.38	35.52	35.52	26.64
7.	Bajubang	10.05	2.30	3.70	4.80	4.80	3.60
8.	Pemayang	30.15	6.90	11.10	14.40	14.40	10.80
	Jumlah	201.00	46.00	74.00	96.00	96.00	72.00



**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012
SUB SEKTOR HORTIKULTURA**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Maro Sebo Ulu	10.05	0	0.30	1.25	0.90	1.20	1.25	0.90	0.85	1.00	0.80	0.80	0.80
2.	Mersam	10.05	0	0.30	1.25	0.90	1.20	1.25	0.90	0.85	1.00	0.80	0.80	0.80
3.	Muara Tembesi	30.15	0	0.90	3.75	2.70	3.60	3.75	2.70	2.55	3.00	2.40	2.40	2.40
4.	Batin XXIV	26.13	0	0.78	3.25	2.34	3.12	3.25	2.34	2.21	2.60	2.08	2.08	2.08
5.	Maro Sebo Ilir	10.05	0	0.30	1.25	0.90	1.20	1.25	0.90	0.85	1.00	0.80	0.80	0.80
6.	Muara Bulian	74.37	0	2.22	9.25	6.66	8.88	9.25	6.66	6.29	7.40	5.92	5.92	5.92
7.	Bajubang	10.05	0	0.30	1.25	0.90	1.20	1.25	0.90	0.85	1.00	0.80	0.80	0.80
8.	Pemayang	30.15	0	0.90	3.75	2.70	3.60	3.75	2.70	2.55	3.00	2.40	2.40	2.40
	Jumlah	201.0	0	6.00	25.00	18.00	24.00	25.00	18.00	17.00	20.00	16.00	16.00	16.00

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012
SUB SEKTOR HORTIKULTURA**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)													
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des		
1.	Maro Sebo Ulu	2.30	0.30	0.15	0.25	0.20	0.15	0.25	0.15	0.15	0.15	0.25	0.15	0.15	0.15	0.15
2.	Mersam	2.30	0.30	0.15	0.25	0.20	0.15	0.25	0.15	0.15	0.15	0.25	0.15	0.15	0.15	0.15
3.	Muara Tembesi	6.90	0.90	0.45	0.75	0.60	0.45	0.75	0.45	0.45	0.45	0.75	0.45	0.45	0.45	0.45
4.	Batin XXIV	5.98	0.78	0.39	0.65	0.52	0.39	0.65	0.39	0.39	0.39	0.65	0.39	0.39	0.39	0.39
5.	Maro Sebc Ilir	2.30	0.30	0.15	0.25	0.20	0.15	0.25	0.15	0.15	0.15	0.25	0.15	0.15	0.15	0.15
6.	Muara Bulian	17.02	2.22	1.11	1.85	1.48	1.11	1.85	1.11	1.85	1.11	1.85	1.11	1.11	1.11	1.11
7.	Bajubang	2.30	0.30	0.15	0.25	0.20	0.15	0.25	0.15	0.25	0.15	0.25	0.15	0.15	0.15	0.15
8.	Pemayung	6.90	0.90	0.45	0.75	0.60	0.45	0.75	0.45	0.75	0.45	0.75	0.45	0.45	0.45	0.45
	Jumlah	46.00	6.00	3.00	5.00	4.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012
SUB SEKTOR HORTIKULTURA**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)														
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des			
1.	Maro Sebo Ulu	3.70	0	0.15	0.15	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.50
2.	Mersam	3.70	0	0.15	0.15	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.50
3.	Muara Tembesi	11.10	0	0.45	0.45	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	0.90	1.05	0.90	1.50
4.	Batin XXIV	9.62	0	0.39	0.39	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.78	0.91	0.78	1.30
5.	Maro Sebo Ilir	3.70	0	0.15	0.15	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.50
6.	Muara Bulian	27.38	0	1.11	1.11	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.22	2.59	2.22	3.70
7.	Bajubang	3.70	0	0.15	0.15	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.50
8.	Pemayung	11.10	0	0.45	0.45	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	0.90	1.05	0.90	1.50
	Jumlah	74.00	0	3.00	3.00	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	9.00	6.00	10.00

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012
SUB SEKTOR HORTIKULTURA**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)												
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1.	Maro Sebo Ulu	4.80	0.25	0.25	0.25	0.35	0.45	0.35	0.35	0.35	0.40	0.50	0.60	0.50	0.55
2.	Mersam	4.80	0.25	0.25	0.25	0.35	0.45	0.35	0.35	0.40	0.40	0.50	0.60	0.50	0.55
3.	Muara Tembesi	14.40	0.75	0.75	0.75	1.05	1.35	1.05	1.05	1.20	1.20	1.50	1.80	1.50	1.65
4.	Batin XXIV	12.48	0.65	0.65	0.65	0.91	1.17	0.91	0.91	1.04	1.04	1.30	1.56	1.30	1.43
5.	Maro Sebo Ilir	4.80	0.25	0.25	0.25	0.35	0.45	0.35	0.35	0.40	0.40	0.50	0.60	0.50	0.55
6.	Muara Bulian	35.52	1.85	1.85	1.85	2.59	3.33	2.59	2.59	2.96	2.96	3.70	4.44	3.70	4.07
7.	Bajubang	4.80	0.25	0.25	0.25	0.35	0.45	0.35	0.35	0.40	0.40	0.50	0.60	0.50	0.55
8.	Pemayung	14.40	0.75	0.75	0.75	1.05	1.35	1.05	1.05	1.20	1.20	1.50	1.80	1.50	1.65
	Jumlah	96.00	5.00	5.00	5.00	7.00	9.00	7.00	7.00	8.00	8.00	10.00	12.00	10.00	11.00

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 12 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 Maret 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN

No	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	(Dalam Ton)	
						Organik	Organik
1.	Maro Sebo Ulu	270	105.82	40.77	140.9		75
2.	Mersam	270	100	40	145		75
3.	Muara Tembesi	120	70	30	100		33
4.	Batin XXIV	120	70	30	100		30
5.	Maro Sebo Ilir	270	105	40	155		75
6.	Muara Bulian	160	72	30	105		35
7.	Bajubang	170	70	30	100		33
8.	Pemayung	98	53	22	95		20
	Jumlah	1.478.00	645.82	262.77	940.9		376



**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012
SUB SEKTOR PERKEBUNAN**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)													
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des		
1.	Maro Sebo Ulu	40.77	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
2.	Mersam	40	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
3.	Muara Tembesi	30	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
4.	Batin XXIV	30	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
5.	Maro Sebo Ilir	40	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
6.	Muara Bulian	30	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
7.	Bajubang	30	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
8.	Pemayung	22	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
Jumlah		262.77	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012
SUB SEKTOR PERKEBUNAN**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)													
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des		
1.	Maro Sebo Ulu	140.90	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74
2.	Mersam	145	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08
3.	Muara Tembesi	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
4.	Batin XXIV	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
5.	Maro Sebo Ilir	155	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92
6.	Muara Bulian	105	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
7.	Bajubang	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
8.	Pemayung	95	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02
	Jumlah	940.90	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012
SUB SEKTOR PERKEBUNAN**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)													
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des		
1.	Maro Sebo Ulu	75	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
2.	Mersam	75	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
3.	Muara Tembesi	33	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
4.	Batin XXIV	30	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
5.	Maro Sebo Ilir	75	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
6.	Muara Bulian	35	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
7.	Bajubang	33	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
8.	Pemayung	20	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83
Jumlah		376	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.00	31.00	31.00	31.00	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 12 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 Maret 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
 SUB SEKTOR PETERNAKAN MENURUT KECAMATAN

No	Kecamatan	(Dalam Ton)			
		Urea	SP-36	ZA	Organik
1.	Maro Sebo Ulu	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Mersam	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Muara Tembesi	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Batin XXIV	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Maro Sebo Ilir	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Muara Bulian	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Bajubang	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pemayang	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 12 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 Maret 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
 SUB SEKTOR PERIKAMAN MENURUT KECAMATAN

No	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	(Dalam Ton)	
						Organik	Organik
1.	Maro Sebo Ulu	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Mersam	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Muara Tembesi	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Batin XXIV	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Maro Sebo Ilir	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Muara Bulian	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Bajubang	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pemayang	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BUPATI BATANG HARI

 H.A. FATTAH

